

HALAMAN DEPAN SATPOL PP

Tergusur Underpass Miri dan Pelebaran Jalan

PENGASIH (KR)-Halaman depan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kulonprogo sekitar luas 2m2 dan panjang sekitar 20 m2 terdiri dari bentangan corblock yang tertata dan papan nama Satpol PP dibongkar untuk dipindah ke tempat lain. Pembongkaran itu menyusul tergesur pembangunan Underpass Miri dan pelebaran akses jalan.

Kasat Pol PP Kulonprogo Drs Sumiran menyatakan, seluruh karyawan bahu membahu memindahkan corblock yang terbongkar untuk diamankan di belakang lokasi kantor sambil menunggu perkembangan lebih lanjut, untuk pemasangan kembali di tempat yang disesuaikan.

"Papan nama yang ikut tergesur dan semula tepat di depan kantor, ditempatkan kembali di kanan depan lokasi kantor. De-



KR-Widiastuti
Kerja bakti memindah corblok halaman Satpol PP Kabupaten Kulonprogo.

ngan peralatan dan sumber daya yang ada, akhirnya semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik lancar dan aman," kata Sumiran, Selasa (1/6).

Sumiran menjelaskan, dibangunnya underpass dan rencana ke depan ditutupnya perlintasan sebidang Kereta Api di depan SMK Bopkri Wates, arus lalu lintas akan dialihkan melalui jalan baru tersebut, sehingga depan

kantor Satpol PP akan menjadi jalan utama dari dan menuju Pengasih.

"Guna keamanan, keselamatan dan kelancaran mobilitas karyawan Satpol PP serta seluruh tamu, pimpinan dan seluruh karyawan Satpol PP memohon kepada pemkab agar di tahun berikutnya menganggarkan pembangunan pagar bumi sekeliling Satpol PP," pinta Sumiran. (Wid)-f

ATASI HAMA KEONG EMAS

Petani Kembangkan Ternak Bebek

PENGASIH (KR) - Dinas Pertanian dan Pangan menilai peluang ternak bebek di area sawah endemis keong mas sebenarnya cukup menjanjikan. Untuk mendapatkan produksi maksimal maka dinas tersebut melakukan kajian. Selain itu juga mendampingi Kelompok Tani Bangunrejo di Kalurahan Sindutan, Kapanewon Temon berinovasi dalam menangkang peluang ternak bebek di lahan endemis keong mas.

"Saat ini kami sedang mengkaji inovasi yang dilakukan Kelompok Tani Bangunrejo. Kalau hasilnya efektif, efisien dan menguntungkan petani maka inovasi itu baru dikembangkan," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan setempat, Ir Aris Nugroho, Selasa (1/6).

Menurutnya, peluang bisnis bebek memiliki prospek cukup cerah karena peluang pasar luas. Apalagi masyarakat gemar makan daging bebek, sehingga saat ini banyak kuliner bebek. Agar makanan tersebut tetap digemari masyarakat maka para peternak harus memperhatikan kualitas bebek dan telur yang dihasilkan.

"Menjaga kualitas penting, karena kalau tidak mampu bersaing dengan pasar tentu usaha yang dijalankan tidak bisa berkembang," ujarnya menambahkan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas daging bebek maupun telur ditentukan oleh nutrisi pakan yang diberikan.

Tentang upaya membuka ternak bebek di lahan endemis keong mas, diakui me-

mang termasuk salah satu hama bagi tanaman padi di area sawah yang berada di wilayah Temon karena rawan banjir dan tergenang air.

"Keong mas menjadi musuh utama petani karena sering menyebabkan petani harus tanam padi berulang-ulang setiap musim tanamnya. Apalagi hewan itu sangat mudah berkembang biak dengan cara bertelur dan jumlahnya banyak dalam satu musim tanam," katanya.

Tingginya serangan keong mas menjadi beban tersendiri bagi petani karena harus mengeluarkan banyak biaya untuk benih dan tenaga kerja tanam. Sehingga para petani perlu berinovasi untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul.

"Salah satu upaya dan inovasi yang dilakukan Kelompok Tani Bangunrejo mengkombinasikan usaha tani padi dengan memelihara bebek. Keberadaan keong mas memudahkan para petani dalam memberi pakan ternak bebek mereka sekaligus bisa meningkatkan kualitas bebek yang dipelihara," jelasnya.

Dengan inovasi tersebut para petani mendapat dua keuntungan. Lahan bebek aman dari serangan hama keong mas juga bisa meningkatkan kualitas telur dan daging bebek.

"Dari pakan keong mas perkembangan bebeknya lebih baik dan telur yang dihasilkan juga lebih berkualitas pada tingkat warna kuning telurnya," tutur Aris. (Rul)-f

PEMULIHAN EKONOMI

Pandemi, Pemkab Agar Buat Program Strategis

PENGASIH (KR)-Pemkab Kulonprogo agar membuat program strategis pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Akhir 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kulonprogo mengalami minus 4,86 persen akibat dampak pandemi Covid-19, di mana angka kemiskinan dan pengangguran tinggi. Diharapkan triwulan kedua 2021 ini, pemkab bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat supaya lepas dari krisis.

"Pada masa pandemi, bantuan penanganan Covid-19 di Kulonprogo ini sangat banyak, tetapi belum ada efeknya bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Pemulihan ekonomi ini bagaimana membuat masyarakat lebih mandiri, produktif, dan tidak mengandalkan bantuan pemerintah secara terus menerus," kata Wakil Ketua II DPRD Kabupaten

Kulonprogo Lajiyu Yok Mulyono, beberapa hari lalu.

Hal itu menjadi pekerjaan rumah bersama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kulonprogo. Diharapkan pula pemkab melalui dinas teknis membuat program yang mampu menumbuhkan ekonomi dan kemandirian masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo sebelumnya menuturkan, bahwa pemkab mengoptimalkan sektor pertanian sebagai trigger pemulihan ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19, karena mayoritas penduduk di wilayah ini adalah petani. Tulang punggung ekonomi di Kulonprogo masih didominasi sektor pertanian, sehingga pada masa pandemi Covid-19 menjadi sektor yang tidak terpengaruh. (Wid)-f

MENKOP UKM DORONG

Pemkab Bangun Rumah Produksi Bersama

WATES (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo didorong melakukan transformasi pengembangan teknologi produksi dengan membangun rumah produksi bersama bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar mereka bisa bertahan pada masa pandemi Covid-19.

"Di tengah pandemi Covid-19, kita memang perlu bertransformasi melakukan pengembangan teknologi produksi supaya produk yang dihasilkan UMKM punya daya saing

di pasaran," kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki saat kunjungan kerja dan ditemui Bupati Kulonprogo Drs Sutedjo, Wabup Fajar Gegana bersama jajarannya baru-baru ini.

Salah satu transformasi teknologi yang bisa dilakukan pemkab ungkap Teten adalah strategi *manufakturing* berupa pengembangan konsep rumah produksi bersama bagi UMKM yang belum bisa memiliki alat produksi modern.

"Kalau sudah ada ru-

mah produksi bersama tentu UMKM bisa menggunakan jasa fasilitas tersebut bisa mereka manfaatkan. Dengan demikian produksi tetap jalan meski di tengah keterbatasan alat produksi sendiri," tuturnya.

Saat ini Kementerian Koperasi UKM juga membidik pasar ekspore karena banyak sekali produk-produk lokal atau nasional yang bisa di ekspor. Sementara, pemerintah akan membantu sistem logistik, termasuk sertifikasi. (Rul)

SIDAK KOMISI III

Banyak Aduan Penambangan Ilegal Rusak Lingkungan

LENDAH (KR) - Banyak aduan dari masyarakat yang diterima Komisi III DPRD Kabupaten Kulonprogo terkait adanya penambangan ilegal di belakang Balai Kalurahan Ngentakrejo Kapanewon Lendah yang merusak lingkungan.

Komisi III minta Pemkab Kulonprogo segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUESDM) DIY agar menertibkan penambangan pasir ilegal sepanjang Sungai Progo, khususnya di Kalurahan Ngentakrejo tersebut.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi III DPRD Kulonprogo Wisnu Prasetya, Selasa (1/6).

"Komisi III Senin (31/5), inspeksi mendadak (sidak) di lokasi tambang, menemukan fakta, bahwa tambang pasir di belakang Balai

Kalurahan Ngentakrejo ilegal dan merusak lingkungan. Kami juga menemukan mesin alat sedot industri dan lebih dari lima alat berat untuk mengeruk lokasi tambang," ujar Wisnu. Enam anggota DPRD Kulonprogo yang melakukan sidak terdiri Wisnu Prasetya, Sasmita Hadi, Muji Harsa, Sumardi, Tukijan, serta Jeni Widiyatmoko.

Tambang ini, lanjut Wisnu, berdasar laporan sudah berjalan cukup lama, tetapi tak ada tindakan pemkab untuk melaporkan ke Pemda DIY bahwa adanya penambangan ilegal

yang berpotensi merusak lingkungan. Kewenangan penerbitan izin penambangan adalah pemerintah pusat, dengan rekomendasi dari kabupaten dan provinsi. Kalau UKL/UPL tidak layak, pemkab harus tegas dan tidak menerbitkan rekomendasi.

Pemkab, kata anggota Komisi III Muji Harsa, agar lebih serius dalam pemberian rekomendasi penambangan supaya tidak merusak lingkungan. Penambangan rakyat harus memperhatikan aturan yang berlaku, namun temuan dari sidak ini jauh dari kata penambangan rakyat, melainkan eksploitasi yang merusak lingkungan karena memakai alat berat dan alat sedot industri. "Pemkab melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) supaya hati-

hati menerbitkan surat rekomendasi izin penambangan. DLH harus meninjau ke lapangan atas dampak yang ditimbulkan," tandasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati SE menuturkan, DPRD Kulonprogo berkomitmen melakukan pengawasan terhadap penambangan, khususnya penambangan ilegal. Sebab penambangan ilegal ini yang diuntungkan hanya oknum tertentu, dan dampak yang ditimbulkan sangat banyak. Mulai dari kerusakan lingkungan maupun jalan umum. Kenyataan di lapangan, banyak ruas jalan yang dilalui truk armada tambang rusak parah dan tidak dibenahi. (Wid)-f

SIASATI TINGGINYA HARGA KEDELAI IMPOR

Perajin Tahu Kurangi Ukuran



KR-Asrul Sani
Dawun menunjukkan sample tahu yang diproduksi.

SENTOLO (KR) - Guna mengatasi melambungnya harga kedelai impor agar para perajin tahu tetap bisa berproduksi maka salah satu caranya mengurangi ukuran produk

tahu. Harga kedelai impor saat ini mencapai Rp 11.000 perkilogram.

"Mensiasati harga kedelai mahal sangat terpaksa kami memperkecil ukuran tahu. Kalau tidak demi-

kian tentu perajin akan merugi," kata Dawud, perajin tahu di Sentra Industri Tahu, Pedukuhan Wonobroto, Kalurahan Teksno, Kapanewon Sentolo, Selasa (1/6).

Diungkapkan, pengurangan ukuran tahu yang diproduksi agar usahanya bisa tetap untung, meski persentase keuntungannya sangat tipis.

"Mengurangi ukuran tahu lebih aman ketimbang menaikkan harga jual, sehingga pelanggan tidak lari. Kalau harga produk dinaikkan konsumen pasti keberatan, jadi mendingan mengurangi ukurannya saja," tuturnya.

Dalam memproduksi ta-

hu putih, Dawun bisa menghabiskan 50 kilogram kedelai impor dari Amerika dan menghasilkan 1.000 potong tahu. "Untuk harga jualnya bervariasi, tergantung ukuran. Paling murah Rp 250 perpotong dan paling mahal Rp 600 perpotong," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Paguyuban Tahu Murni Wonobroto, Ponimin Harjono, mengungkapkan, para perajin tahu enggulkan tingginya harga kedelai saat ini. Kondisi semakin memprihatinkan seiring naiknya harga minyak goreng dan plastik untuk mengemas produk tahu. (Rul)-f

UNIT PRODUKSI MAN 2 KULONPROGO

Terima Sertifikat Halal dari BPJPH



KR-Widiastuti
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Prof Dr Muhammad Ali Ramdhani STP MT meninjau ruang workshop keterampilan.

UNIT Produksi (UP) MAN 2 Kulonprogo telah menerima Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia pada Kamis (27/5). Sertifikat Halal yang diterima untuk jenis produk roti dan kue ini berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia Nomor 12200007701120 dengan Nomor Sertifikat ID3411000046721120. Sertifikat ini ditandatangani Sukoso sebagai Kepala BPJPH, berlaku selama 5 tahun sampai dengan 25 November 2024.

Mengetahui hal ini, Kakanwil Kemenag DIY Drs H Edhi Gunawan MPd menyampaikan apresiasinya. "Saya memberikan apresiasi atas keberhasilan MAN 2 Kulonprogo mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Ini menjadi bukti wujud komitmen keseriusannya dalam mengelola unit usaha yang ada. Semua menjadi bagian menjaga amanah sebagai Modified Teaching Factory," ungkap Edhi Gunawan.

Sementara itu, Hartiningsih MPd Kepala MAN 2 Kulonprogo menyatakan, sebagai madrasah plus keterampilan, madrasah selalu berupaya memberikan pelayanan inovasi yang memadai untuk anak-anak yang memang serius terjun di bidang keterampilan.

"Setelah kemarin mendapat penghargaan 45 TOP MAN de Motefa dari Penpan RB RI berkonsep Teaching Factory, kini produk keterampilan khususnya Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) MAN 2 Kulonprogo semakin dipercaya de-

ngan Sertifikat Produk Halal dari Kementerian Agama RI. Ini penghargaan luar biasa sebagai sebuah kepercayaan yang tinggi. Harapannya produk UP kami bisa lebih dipercaya masyarakat, karena sudah jelas kehalalannya dan bisa bersaing di pangsa pasar," papar Hartiningsih.

Jaminan Produk Halal
BPJPH sendiri adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar Produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.

Ada tiga pihak utama yang berperan dalam layanan sertifikasi halal, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pengajuan sertifikasi halal dimulai dari pendaftaran ke Dinkop UKM Kulonprogo dan bagian sertifikasi halal Kemenag DIY sekitar awal November 2020, kemudian pemeriksaan dengan audit secara online pada 16 November 2020 melalui video call WA oleh Auditor drh Hj Dyah Ayu Widiastuti PhD dan Dr drh Yatri Drastini MSc.

Hal yang harus disiapkan untuk audit adalah bahan baku, lokasi produksi, pembacaan ikrar halal oleh ketua tim halal, dan sistem jaminan halal. Sebelum dilakukan pemeriksaan Ke-

tua Tim Halal mengikuti pelatihan tentang produk halal dan melengkapi persyaratan administrasi. Selanjutnya tinggal menunggu hasil dari sidang fatwa halal untuk diterbitkan atau tidak sertifikasinya.

Jenis produk roti dan kue yang didaftarkan meliputi stik growol (stik-grow), pizza growol jagung manis nanas (pizgrow), roti isi selai nanas, roti cokelat, roti blueberry, dan pie susu. Saat audit semua bahan baku produk disiapkan dan diperiksa satu per satu kehalalannya. Jadi semua bahan yang digunakan harus dari sumber yang halal. Tak luput pula alat dan tempat produksi juga harus bersih dan halal.

Selaku Kepala Unit produksi, Imam Muttaqien STP mengungkapkan rasa syukurnya atas proses panjang yang telah dilaluinya. Dimulai pendaftaran, membuat UMKM, Bimtek Produk dan Manajemen Halal, membuat proposal produk halal sampai verifikasi online dari BPOM MUI. UP Mandaku menjadi satu-satunya UMKM yang lahir pada instansi pendidikan dan berhasil mendapatkan sertifikat halal untuk 6 produk.

"Adanya sertifikat halal ini menegaskan bahwa komitmen kami dalam hal menghasilkan produk unggulan tidak hanya memenuhi standar kesehatan dan nilai jual yang kompetitif, tetapi juga berkomitmen menghasilkan produk yang jelas kehalalannya. Ke depannya semua produk pangan yang dihasilkan oleh UP MAN 2 Kulonprogo akan didaftarkan untuk memperoleh sertifikat halal," tegas Imam. (Wid)-f